

**PROBLEMATIKA HIERARKI KETETAPAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**OLEH  
AKHMAD RIZKY MAULIDI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1446 H**

**PROBLEMATIKA HIERARKI KETETAPAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

**Oleh**  
**Akhmad Rizky Maulidi**  
**210102030168**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**BANJARMASIN**  
**2025 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Rizky Maulidi  
NIM : 210102030168  
Tempat/Tgl. Lahir : Sampit, 9 Juni 2002  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 April 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



Akhmad Rizky Maulidi

## SERTIFIKAT PLAGIASI

<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>		
<b>FAKULTAS SYARIAH</b>		
<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>		
<b>ANTASARI</b>		
<hr/>		
Nomor: B-3642/Jn.14/III.2/PP00.9/11/2025		
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <a href="https://www.turnitin.com/">https://www.turnitin.com/</a> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:		
Nama :	Akhnad Rizky Maulidi	
NIM :	210102030168	
Prodi :	Hukum Tata Negara	
Judul :	Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	
memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.		
Mengetahui,		
 		
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK		

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**







Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon  
(0511) 3265783

website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Akhmad Rizky Maulidi  
**NIM** : 210102030168  
**JUDUL** : Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan  
 Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia  
**DOSEN** : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi Bab I	terima' seti apa Rizky	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	ce	
3		Konsultasi Bab II	Teri Syman kontribusi - Dmaga cel Dalam	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	ce	
5		Konsultasi Bab III	Daha klu pmer 44 12 2019 44 17 2022 Perub	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Rgah ahre mpa - dpr	
7		Konsultasi Bab IV (data)	Dah tly ahre uu - fpr mpa - lallosang il	
8		Konsultasi Bab IV (analisis)		

9		Perbaikan dan ACC Bab IV	Revisi bagian hal muka - m - Tafsir mk. Rensi ul.	
10		Konsultasi Bab V	Revisi ul. norma vs supreme. ul.	
11		Perbaikan dan ACC Bab V		
12		Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi		

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Problematika Hierarki Ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam  
Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ditulis oleh : Ahmad Rizky Maulidi

N I M : 210102030168

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Sampit, 9 Juni 2002

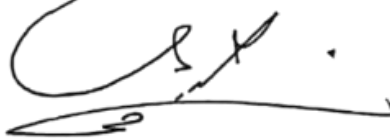
Alamat : Jalan Manunggal II, Gang IV, Rt. 40 Kebun Bunga,  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk  
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Juni 2025

Mengetahui

Pembimbing,



Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
NIP. 198507282015211003

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin



Maistyoko, S.Sos, MH  
NIP. 197901182005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, ditulis oleh (Akhmad Rizky Maulidi dan 210102030168), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Desember 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 82,6 (A)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. Jalaluddin, M.Hum
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si
3. Ergina Faralita, SH., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

## ABSTRAK

**Akhmad Rizky Maulidi.** *Problematika Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata kunci:** Ketetapan MPR RI, hierarki norma, sistem ketatanegaraan, kekosongan hukum, judicial review, Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini membahas problematika hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Studi ini dilatarbelakangi oleh perubahan status MPR RI pasca amandemen UUD 1945, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan Tap MPR dalam hierarki norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Tap MPR RI sebelum dan sesudah amandemen, serta mengkaji implikasi masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum, khususnya teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain kekosongan hukum terkait mekanisme pengujian Tap MPR RI yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, serta pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konstruksi hukum yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Tap MPR RI, serta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperjelas kedudukan dan mekanisme pengujian Tap MPR RI dalam sistem hukum nasional.

## **MOTTO**

“Semua kebenaran di dunia ini harus melewati tiga langkah. *Pertama* ditertawakan, *kedua* ditentang dengan kasar, *dan ketiga* diterima tanpa pembuktian dan alasan”

-Arthur Schopenhauer

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pemahaman iman, islam, dan ihsan kepada kita semua umat manusia.

Karya tulis dari penelitian skripsi ini pastinya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang selalu tanpa henti mendoakan penulis hingga sampai dititik ini. Selalu mendukung dari segi moral, materil, serta harapan besar yang diamanahkan kepada penulis.

Tak lupa pula kepada Bapak dan Ibu Dosen yang selalu senantiasa memberikan ilmunya dengan ikhlas, memberikan dukungan yang tulus, membantu hingga selalu mendoakan setiap langkah perjuangan kami. Teman-teman seperjuangan yang penulis banggakan, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam berbagai hal kebaikan, dan selalu membantu membersamai dalam suka maupun duka yang telah kita lewati.

Terimakasih tak terhingga untuk semua pihak, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta karuniaNya kepada kita semua, dan selalu menerima serta membalas segala kebaikan kita dengan segala kekuasaaanNya. Amin ya Rabbal A'lamin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba  
 فعل - fa‘ala  
 ذكر - žukira  
 يذهب - yažhabu  
 سنل -suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى .... /	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.... /	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa  
 هول - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى.... ء.... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.. ؤ..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رمي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūl

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatu al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala

البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

#### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuẓūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

#### **h) Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

من استطاع اليه سبيلا

manistatā‘a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| وما محمد الا رسول                     | - Wa mā <b>Muhammadun</b> illā rasūl.        |
| ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا | - Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi         |
|                                       | lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.                |
| شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن        | - Syahru <b>Ramadāna</b> al-laẓī unzila fīhi |
|                                       | al- <b>Qurānu</b> .                          |
| ولقد راه بالفق المبين                 | - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.          |
| الحمد لله رب العلمين                  | - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.          |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| نصر من الله وفتح قريب | - Nasrum <b>minallāhi</b> wa fathun qarīb. |
| الله الامر جميعا      | - <b>Lillāhi</b> al-amru jamī'an.          |
|                       | - Lillāhil amru jamī'an.                   |
| والله بكل شيء عليم    | - <b>Wallāhu</b> bikulli syaiin ‘alīmun.   |

### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kendala dan kekurangan yang ada, saya merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematisa Hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Tak henti saya ucap syukur kepada Allah yang maha kuasa yang selalu menguatkan saya dan membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini. Saya sepenuhnya juga menyadari banyak pihak yang telah membersamai, memberikan dukungan, bantuan, bimbingan dan motivasi baik itu melalui berbagai macam bentuk waktu, pikiran, tenaga dan yang lainnya. Maka dari pada itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dwi Arini Zubaidah, M.H. yang memberikan semangat dan membantu dalam berbagai urusan administrasi di jurusan Hukum Tatanegara.

5. Dr. Imam Alfiannor, S. Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing, memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
8. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu menyediakan fasilitas untuk membaca, mencari, dan meminjam referensi selama penulis melakukan penelitian.
9. Semua pihak keluarga, kerabat dan sahabat yang membantu membersamai penulis hingga saat ini.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan - kebaikan yang telah dilakukan dengan beribu-ribu kebaikan lainnya kepada pihak-pihak yang terkait. Saya mengharapkan ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah saya lakukan, dan saya juga memohon maaf kepada pihak terkait maupun pihak pembaca apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal A'lamin.

Banjarmasin, 12 Desember 2025

Tertanda,



Akhmad Rizky Maulidi

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	17
2. Bahan Hukum.....	18
3. Analisis dan Pengolahan Data.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI).....</b>	<b>22</b>
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).....	22
B. Landasan Teori.....	34
<b>BAB III KEDUDUKAN KETETAPAN MPR RI SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN.....</b>	<b>56</b>
A. Kedudukan Ketetapan MPR Sebelum Amandemen .....	56
B. Kedudukan Ketetapan MPR RI Setelah Amandemen .....	61
<b>BAB IV .....</b>	<b>66</b>
<b>IMPLIKASI SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH MASUKNYA KETETAPAN MPR RI DALAM HIERARKI NORMA .....</b>	<b>66</b>
A. Kekosongan Hukum Terhadap Pengujian Ketetapan MPR RI .....	66
B. Pelanggaran Terhadap Prinsip Negara Hukum .....	70
C. Solusi Dalam Menyelesaikan Implikasi Sistem Ketatanegaraan Setelah Dimasukkannya Ketetapan MPR RI Kedalam Hierarki Norma.....	81

D. Kedudukan Tap MPR RI Dalam Pandangan Politik Hukum.....	90
E. Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	104
Surat Keterangan Penetapan Ujian Proposal.....	105
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	106
Surat Izin Penelitian/Riset.....	107
Surat Keterangan Selesai Penelitian/Riset .....	108
Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	109
Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	110
Sertifikat Keterampilan Komputer .....	111
Sertifikat TOEFL .....	112
Surat Keterangan Perolehan SKK.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116